

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sebagai hasil akhir dari analisis empiris yang dilaksanakan terhadap dinamika pengangguran terdidik di Indonesia pada 34 provinsi selama periode 2018-2024, penelitian ini menyampaikan sejumlah simpulan utama yang merangkum keseluruhan temuan dan implikasi dari model estimasi yang digunakan. Berikut ialah kesimpulan pada penelitian ini:

1. Jumlah Perusahaan Industri Terdaftar (JP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Indonesia. Artinya, peningkatan jumlah perusahaan industri yang tercatat secara formal belum secara nyata mampu menurunkan tingkat pengangguran terdidik. Data menunjukkan bahwa meskipun jumlah perusahaan industri meningkat dari sekitar 4 juta unit pada 2018 menjadi sekitar 4,5 juta unit pada 2024, penyerapan tenaga kerja formal lulusan diploma dan universitas tetap terbatas, yakni hanya sekitar 13,1 % dari total tenaga kerja sektor industri, sementara tenaga kerja berpendidikan menengah dan rendah masih mendominasi dengan angka 34,8 %.
2. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. Artinya, perubahan tingkat upah minimum belum memberikan dampak yang nyata terhadap naik atau turunnya tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Meskipun UMP hampir setiap tahun selalu mengalami kenaikan rata-rata $\pm 6\%$ per tahun, tingkat pengangguran terdidik tetap relatif tinggi, sekitar 6,15 %, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi lebih dipengaruhi oleh kesesuaian keterampilan dan struktur permintaan tenaga kerja formal, bukan oleh besaran upah minimum.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik. Artinya, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak secara nyata mampu

menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Pada periode 2018-2024 menunjukkan IPM naik dari 71,94 menjadi 75,02, HLS dari 12,9 menjadi 13,15 tahun, RLS dari 8,2 menjadi 9,0 tahun, dan *life expectancy* dari 71,2 menjadi 74,15 tahun. Terbukti dari jumlah lulusan diploma-IV hingga S-3 hanya menyumbang 13,89 % dari total pengangguran 7,28 juta orang, lebih rendah dibanding lulusan SMA (28,01 %) dan SMK (22,37 %), menegaskan bahwa peningkatan IPM berkorelasi negatif dengan pengangguran terdidik.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Artinya, peningkatan aktivitas dan output ekonomi daerah tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Data menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDRB nasional sekitar 5,1% per tahun, namun tingkat pengangguran terdidik tetap berada di kisaran 5-6%. Contoh provinsi seperti Jawa Barat mencatat pertumbuhan PDRB tahunan sekitar 5,4% pada 2023, sementara pengangguran terdidik masih mencapai 6,1%, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan penyerapan lulusan terdidik. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi cenderung lebih cepat daripada kemampuan pasar kerja formal menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja berpendidikan tinggi.

5.2 Saran

Di bawah ini berbagai saran yang bisa dirumuskan pada penelitian ini agar penelitian ke depannya lebih baik, antara lain:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Penelitian berikutnya disarankan menambahkan variabel lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap pengangguran terdidik, seperti *mismatch* kompetensi, struktur sektor industri, tingkat digitalisasi, investasi PMA/PMDN, kualitas pendidikan tinggi, dan penyerapan tenaga kerja sektor formal. Penambahan variabel tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait dinamika pengangguran terdidik di Indonesia.

2. Studi lanjutan dianjurkan untuk membandingkan FD-GMM dengan metode lain seperti model data panel statis misalnya Fixed Effect Model (FEM) ataupun Random Effect Model (REM), Spatial Panel Model, atau Dynamic Threshold Model. Perbandingan ini akan memperkaya literatur terkait dinamika pengangguran terdidik dan meningkatkan ketepatan estimasi.
3. Menggunakan rentang data yang lebih panjang dapat memperkuat kekuatan instrumen GMM dan menghasilkan estimasi yang lebih stabil serta mampu menangkap dinamika jangka panjang dari pasar tenaga kerja berpendidikan tinggi.

5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah dapat menetapkan skema insentif fiskal berupa pengurangan pajak atau subsidi pelatihan bagi perusahaan industri yang merekrut tenaga kerja lulusan diploma dan sarjana dalam jumlah minimum tertentu setiap tahun. Selain itu, penguatan kerja sama antara perguruan tinggi dan industri dapat dilakukan melalui program magang wajib berbasis kurikulum dengan kontrak penyerapan kerja pasca-magang. Selain itu, penetapan UMP perlu disertai dengan kebijakan pendukung berupa skema upah berbasis produktivitas dan kompetensi, khususnya bagi tenaga kerja terdidik, melalui penerapan struktur dan skala upah yang wajib diimplementasikan di sektor formal. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan insentif non-upah, seperti subsidi iuran jaminan sosial atau potongan pajak daerah, bagi perusahaan yang merekrut lulusan pendidikan tinggi pada posisi awal karier.
2. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi dan vokasi pada program peningkatan keterampilan spesifik (*skill upgrading*) yang dibutuhkan sektor unggulan daerah, seperti pelatihan berbasis sertifikasi kompetensi nasional dan internasional. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas program pelatihan ulang (*reskilling*) bagi lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja melalui kerja sama dengan industri dan lembaga sertifikasi profesi, sehingga peningkatan IPM tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan pengangguran terdidik.

3. Mengingat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik, pemerintah perlu mengarahkan strategi pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berbasis penciptaan lapangan kerja berkualitas. Secara konkret, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengembangan sektor-sektor padat keterampilan dan bernilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan, jasa profesional, ekonomi digital, dan riset-inovasi, yang memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja berpendidikan. Pemerintah daerah juga perlu mensyaratkan komitmen penyerapan tenaga kerja terdidik dalam setiap pemberian izin investasi dan proyek strategis daerah, sehingga pertumbuhan PDRB tidak hanya meningkatkan output ekonomi, tetapi juga secara nyata menurunkan tingkat pengangguran terdidik.